

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *“Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1995
- Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1987
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan hukum “Prof. Oeman Seno Adji, S.H. & Rekan”, 2002
- Muladi, *Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, dimuat dalam Pustaka Peradilan, Jilid IX, Mahkamah Agung RI, 1998,
- Marpaung Leden, *TindakPidanakorupsiMasalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- AbdulLatief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- AbdulLatif, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) Pada Pemerintahan daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.